

HUBUNGAN ANTARA STIGMA AFILIASI DAN KEPUASAN PERNIKAHAN PADA IBU YANG MEMILIKI ANAK DENGAN DISABILITAS INTELEKTUAL DI SLB NEGERI SEMARANG

Eliana Shema Huwae¹, Costrie Ganes Widayanti¹
15000122120077

¹Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Mr. Sunario, Tembalang, Semarang, 50275
E-mail: elianaundip@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji hubungan antara stigma afiliasi dan kepuasan pernikahan pada ibu yang memiliki anak dengan disabilitas intelektual di SLB Negeri Semarang. Hipotesis yang diajukan adalah adanya hubungan negatif antara stigma afiliasi dan kepuasan pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik *purposive sampling*. Responden penelitian berjumlah 110 orang dengan kriteria ibu kandung yang masih berstatus menikah serta memiliki anak dengan disabilitas intelektual. Alat ukur yang digunakan adalah Skala Stigma Afiliasi yang disusun oleh peneliti berdasarkan aspek dari Mak dan Cheung (2008), serta Skala Kepuasan Pernikahan yang disusun oleh peneliti berdasarkan sepuluh aspek kepuasan pernikahan menurut Fowers dan Olson (1993). Data dianalisis menggunakan teknik regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara stigma afiliasi dan kepuasan pernikahan pada ibu yang memiliki anak dengan disabilitas intelektual di SLB Negeri Semarang ($r_{xy} = -0,261$, $p < 0,006$), yang berarti semakin tinggi stigma afiliasi, maka semakin rendah kepuasan pernikahan. Mayoritas responden berada pada kategori stigma afiliasi rendah (46,4%) dan tingkat kepuasan pernikahan yang sangat tinggi (60,9%). Dengan demikian, ibu diharapkan dapat mempertahankan serta meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menjaga kepuasan pernikahan.

Kata kunci: stigma afiliasi, kepuasan pernikahan, ibu, disabilitas intelektual

**THE RELATIONSHIP BETWEEN AFFILIATE STIGMA AND MARITAL
SATISFACTION AMONG MOTHERS OF CHILDREN WITH
INTELLECTUAL DISABILITIES AT SLB NEGERI SEMARANG**

Eliana Shema Huwae¹, Costrie Ganes Widayanti¹
15000122120077

¹Faculty of Psychology, Diponegoro University
Jl. Prof. Mr. Sunario, Tembalang, Semarang, 50275
E-mail: elianaundip@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to examine the relationship between affiliate stigma and marital satisfaction among mothers of children with intellectual disabilities at SLB Negeri Semarang. The hypothesis proposed was that there is a negative relationship between affiliate stigma and marital satisfaction. This study employed a quantitative approach using a purposive sampling technique. The participants consisted of 110 biological mothers who were currently married and had children with intellectual disabilities. The instruments used were the Affiliate Stigma Scale, developed by the researcher based on the dimensions proposed by Mak and Cheung (2008), and the Marital Satisfaction Scale, developed by the researcher based on the ten dimensions of marital satisfaction proposed by Fowers and Olson (1993). Data were analyzed using simple linear regression. The results indicated a significant negative relationship between affiliate stigma and marital satisfaction among mothers of children with intellectual disabilities at SLB Negeri Semarang ($r_{xy} = -0.261$, $p < .006$), indicating that higher levels of affiliate stigma were associated with lower levels of marital satisfaction. The majority of participants were categorized as having low affiliate stigma (46.4%) and very high marital satisfaction (60.9%). Therefore, mothers are expected to maintain and enhance their understanding and skills in sustaining marital satisfaction.

Keywords: affiliate stigma, marital satisfaction, mothers, intellectual disability

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan hubungan intim yang diakui secara sosial dan hukum (Durtschi dkk., 2017). Pernikahan menjadi tahap yang penting karena stabilitas dan keberhasilannya berdampak pada kesejahteraan individu (Mäki dkk., 2025; Margelisch, 2017). Seiring dengan hal tersebut, data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) menurut Status Perkawinan 2017–2021 menunjukkan bahwa kelompok menikah memiliki skor indeks kebahagiaan yang lebih tinggi daripada kelompok belum menikah, cerai hidup, dan cerai mati. Temuan serupa juga dilaporkan oleh berbagai studi internasional (Gilan dkk., 2021; Lawrence dkk., 2019; Purol dkk., 2021; Wang dkk., 2022). Hal ini menegaskan keterkaitan antara keberhasilan pernikahan dengan kesejahteraan individu. Pernikahan yang berhasil berkontribusi pada berbagai aspek kesejahteraan, mulai dari kesehatan fisik dan mental (Lawrence dkk., 2019; Pengpid dkk., 2024; Slatcher & Schoebi, 2017), hingga peningkatan kondisi sosioekonomi, seperti pendapatan tahunan yang lebih tinggi, kepercayaan interpersonal yang lebih kuat, serta rasa kesepian yang lebih rendah (DeMaris & Oates, 2021; Slatcher & Schoebi, 2017).

Salah satu indikator keberhasilan dalam pernikahan adalah mencapai kepuasan pernikahan (Fowers & Olson, 1993; Nikooy dkk., 2024; Nunes dkk., 2022). Kepuasan pernikahan berarti perasaan bahagia atau sukacita yang

dirasakan pasangan ketika menilai segala aspek dalam pernikahan mereka (Bilal & Rasool, 2020; Fowers & Olson, 1993). Kepuasan ini bersifat multidimensional karena mencakup berbagai interaksi dan hubungan pasangan, seperti ketertarikan pada satu sama lain, saling peduli dan menerima, memiliki minat yang sama, berbagi tanggung jawab, hubungan seksual, ekspresi emosi, dan komunikasi (Pickar & Kaufman, 2015). Ketika cara pasangan mengatur tanggung jawab dan berkomunikasi mengalami masalah, kepuasan pernikahan dapat terganggu (Martínez-Pampliega dkk., 2019).

Dinamika kepuasan pernikahan menjadi semakin kompleks pada pasangan yang memiliki anak dengan disabilitas (Hoseinnejad dkk., 2020; Priego-Ojeda & Rusu, 2023). UU No. 8 Tahun 2016 mengartikan penyandang disabilitas sebagai tiap individu yang terbatas pada mental, fisik, sensorik, dan/atau kecerdasan dalam waktu yang lama dan menghalangi efektivitas keterlibatan mereka di tengah masyarakat. Penyandang disabilitas dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, salah satunya adalah penyandang disabilitas intelektual. Menurut Desiningrum (2016), istilah disabilitas intelektual atau tunagrahita dipakai untuk menyebut anak dengan fungsi intelektual di bawah rata-rata. Anak dengan disabilitas intelektual memerlukan perlakuan khusus agar mampu mengembangkan kemampuan secara maksimal (Desiningrum, 2016). Orang tua dari anak dengan disabilitas intelektual sering kali menghadapi beban sosial, psikologis, fisik, dan finansial yang lebih berat dibandingkan orang tua dengan anak tanpa disabilitas intelektual (Rakap dkk., 2023). Mereka juga lebih rentan memiliki gejala depresi dan/atau kecemasan (Sharma dkk., 2021). Kondisi ini

tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga menurunkan kepuasan pernikahan (Islam dkk., 2022).

Pasangan dengan anak disabilitas intelektual mengalami lebih banyak konflik dan kepuasan pernikahan yang lebih rendah daripada pasangan dengan anak tanpa disabilitas (Priego-Ojeda & Rusu, 2023). Kepuasan pernikahan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena berkaitan erat dengan keberfungsian keluarga secara keseluruhan (Langley dkk., 2021). Selain itu, Greenlee dkk. (2021) menunjukkan bahwa kepuasan pernikahan yang rendah pada orang tua anak dengan disabilitas intelektual dapat memengaruhi pola pengasuhan yang lebih otoriter sehingga meningkatkan masalah emosional dan perilaku pada anak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepuasan pernikahan tidak hanya berdampak pada hubungan pasangan, tetapi juga memiliki implikasi terhadap pengasuhan dan kesejahteraan keluarga secara lebih luas.

Meskipun kepuasan pernikahan dialami oleh kedua pasangan, dalam konteks keluarga dengan anak disabilitas intelektual, pengalaman pengasuhan tidak selalu dirasakan secara setara oleh ibu dan ayah. Ibu yang memiliki anak dengan disabilitas intelektual merasakan beban ekonomi, fisik, sosial, emosional, serta beban pengasuhan yang jauh lebih tinggi dibandingkan ayah (Karayagiz-Muslu & Coskun-Cenk, 2018; Rakap dkk., 2023; Sharma dkk., 2021). Berbagai stresor yang dialami oleh ibu dapat menurunkan kepuasan pernikahan (Kwok dkk., 2014). Hal ini didukung oleh nilai sosio-kultural di Indonesia yang menempatkan ibu dari anak dengan disabilitas intelektual pada peran pengasuhan yang tidak disertai otoritas (Fitriyah, 2020). Kondisi ini semakin diperkuat oleh

temuan lain yang menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya bertanggung jawab sebagai istri bagi suaminya dan ibu bagi anaknya, tetapi juga bertugas mencari pendapatan keluarga (Fajar dkk., 2023; Sitanggang, 2018). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada ibu untuk memperoleh pemahaman yang lebih spesifik mengenai kepuasan pernikahan dalam konteks pengasuhan anak dengan disabilitas intelektual.

Salah satu beban yang dihadapi oleh ibu yang memiliki anak dengan disabilitas intelektual adalah stigma dari lingkungan sosial (Badu, 2016). Secara umum, stigma merupakan atribut yang sangat merendahkan seorang individu dan menggambarkan hubungan sosial antara individu dengan persepsi masyarakat yang diterima (Goffman, 1963). Pelabelan, stereotip, pemisahan, kehilangan status, dan diskriminasi muncul secara bersamaan ketika stigma muncul (Link dan Phelan, 2001). Stigma tidak hanya berdampak pada individu yang distigmatisasi. Mak dan Cheung (2008) memperkenalkan konsep stigma afiliasi (*affiliate stigma*), yaitu pengalaman individu dalam menginternalisasi stigma karena berhubungan dekat dengan individu yang distigmatisasi. Stigma yang diinternalisasi oleh individu dapat memengaruhi emosi, kognisi, dan tindakannya (Mak & Cheung, 2008; Özmen & Erdem, 2018).

Ibu sering kali disalahkan atas kondisi anak, menerima komentar negatif dari keluarga besar maupun lingkungan sekitar, merasa malu membawa anak ke ruang publik, menghindari interaksi sosial, serta merasa dinilai gagal dalam menjalankan perannya sebagai orang tua (Badu, 2016; Chiu dkk., 2012; Oti-Boadi, 2017). Akibatnya, ibu merasa tidak diterima di lingkungan sosial dan

memandang kondisi anak sebagai sesuatu yang tabu untuk diketahui orang lain (Badu, 2016; Oti-Boadi, 2017). Beberapa konteks budaya bahkan menekankan pada keadaan anak dengan harapan sosial. Kondisi anak bahkan dianggap sebagai akibat dari karma buruk atau kegagalan keluarga dalam memenuhi ekspektasi sosial sehingga menimbulkan rasa malu dan mengurangi citra positif keluarga secara keseluruhan (Chiu dkk., 2012; Oti-Boadi, 2017). Paparan stigma yang terjadi secara berulang dapat mendorong ibu menginternalisasi penilaian negatif tersebut ke dalam dirinya. Adapun efek jangka panjang dari stigma yang terinternalisasi dapat meningkatkan kerentanan terhadap permasalahan kesehatan mental, serta membuat ibu merasa terisolasi dan menyembunyikan kondisi anak atau menarik diri dari interaksi sosial (Chiu dkk., 2012; Oti-Boadi, 2017). Keyakinan dan persepsi negatif ibu terhadap pandangan sosial mengenai dirinya memengaruhi penilaian terhadap relasi pernikahan (Kwok dkk., 2014). Tekanan psikologis yang dialami ibu dapat memengaruhi cara ibu memandang dukungan yang diberikan pasangan serta kemampuan pasangan dalam menghadapi tekanan pengasuhan secara bersama-sama. Ketika ibu merasa kurang memperoleh dukungan atau kurang mampu bekerja sama dengan pasangan dalam menghadapi stres, kepuasan terhadap hubungan pernikahan dapat menurun (Pavon dkk., 2024).

Dengan demikian, terdapat beberapa celah sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. Pertama, meski stigma afiliasi telah terbukti memiliki hubungan negatif dengan kepuasan pernikahan (Molero dkk., 2024), penelitian tersebut masih mengkaji ibu dan ayah sebagai satu kelompok sehingga pengalaman spesifik ibu terkait kepuasan pernikahan belum dipahami secara mendalam.

Padahal, pengalaman pengasuhan anak dengan disabilitas intelektual tidak dirasakan secara setara oleh ibu dan ayah (Rakap dkk., 2023; Sharma dkk., 2021). Selain itu, kepuasan pernikahan merupakan evaluasi subjektif individu terhadap hubungan pernikahannya (Fowers & Olson, 1993) sehingga dapat dikaji berdasarkan pengalaman dan penilaian pribadi salah satu pasangan.

Kedua, hasil penelitian oleh Molero dkk. (2024) diperoleh dari konteks budaya Eropa yang memiliki karakteristik sosial dan budaya berbeda dengan Indonesia. Padahal, relevansi penggunaan konsep stigma afiliasi semakin kuat ketika ditempatkan pada konteks budaya kolektif seperti di Indonesia. Norma sosial dan nilai kolektif di Indonesia berperan besar dalam membentuk serta memperkuat proses internalisasi stigma pada individu maupun keluarga (Santosa dkk., 2024).

Ketiga, penelitian-penelitian tentang stigma afiliasi pada ibu dengan anak disabilitas intelektual masih berfokus pada dampak psikologis, seperti stres, kecemasan, atau kesejahteraan emosional (Badu, 2016; Kasimoglu & Arkan, 2021; Mitter dkk., 2018) sehingga belum banyak studi yang menghubungkan stigma afiliasi secara langsung dengan kepuasan pernikahan. Padahal, stigma afiliasi tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan psikologis individu, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas relasi interpersonal, termasuk hubungan pernikahan (Chiu dkk., 2012; Molero dkk., 2024).

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara langsung hubungan antara stigma afiliasi dan kepuasan pernikahan pada ibu yang memiliki anak dengan disabilitas intelektual di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini merumuskan masalah mengenai ada atau tidaknya hubungan antara stigma afiliasi dan kepuasan pernikahan pada ibu yang memiliki anak dengan disabilitas intelektual di SLB Negeri Semarang.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menguji keterkaitan antara stigma afiliasi dan kepuasan pernikahan pada ibu yang mempunyai anak dengan disabilitas intelektual di SLB Negeri Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya literatur ilmu di bidang psikologi, yaitu psikologi klinis, psikologi keluarga, dan psikologi anak berkebutuhan khusus.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi SLB Negeri Semarang

Bagi SLB Negeri Semarang, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan atau bahan referensi dalam memahami tantangan yang dialami ibu sebagai pengasuh utama anak dengan disabilitas intelektual. Dengan pemahaman ini, sekolah dapat merancang program dukungan bagi orang tua, khususnya ibu, yang

lebih tepat sasaran.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan kajian sejenis dengan variabel yang lebih beragam, misalnya dengan melibatkan peran ayah, jenis disabilitas tertentu, atau faktor lain, seperti dukungan sosial, gaya pengasuhan, atau religiusitas.